

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN JENEPONTO : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN PADA PERIODE 2015-2024

HUMAN DEVELOPMENT INDEX ANALYSIS OF JENEPONTO REGENCY : THE INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH AND POVERTY IN THE 2015-2024

Astria¹

¹ Politeknik STIA LAN Makassar
email: astriana@stialanmakassar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jeneponto selama periode 2015-2024 serta mengkaji pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan terhadap perubahan IPM. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis dilakukan melalui analisis tren dan regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan IPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Jeneponto mengalami tren peningkatan yang relatif konsisten selama periode pengamatan. Pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan IPM dan tingkat kemiskinan menunjukkan hubungan negatif terhadap IPM. Temuan ini menunjukkan pentingnya kebijakan pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan guna meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Jeneponto.

Kata Kunci : IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Regresi Linier Berganda, Kabupaten Jeneponto.

Abstract

This study aims to analyze the development of the Human Development Index (HDI) in Jeneponto Regency over the past 10 years and examine the influence of economic growth and poverty rates on changes in the HDI. The study employed a descriptive quantitative approach utilizing secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. The analysis was conducted using trend analysis and multiple linear regression to determine the relationship between economic growth, poverty rates, and the HDI. The results indicate that the HDI in Jeneponto Regency experienced a relatively consistent upward trend throughout the observation period. Economic growth contributed positively to the increase in the HDI, while the poverty rate showed a negative relationship with the HDI. These findings demonstrate the importance of development policies that can encourage inclusive economic growth while reducing poverty levels to improve the quality of human development in Jeneponto Regency.

Keywords: HDI, Economic Growth, Poverty, Multiple Linear Regression, Jeneponto Regency.

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan dalam mengevaluasi tingkat berhasilnya pembangunan dari perspektif kualitas hidup masyarakat, bukan semata-mata dari besarnya aktivitas ekonomi. Berbeda dengan indikator ekonomi makro yang mengukur peningkatan output melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), IPM menilai capaian pembangunan berdasarkan kondisi kesehatan, tingkat pendidikan, dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, dalam evaluasi kebijakan publik, IPM lebih mencerminkan hasil akhir (*outcome*) pembangunan daripada sekadar keluaran (*output*) dari berbagai program pemerintah.

Pembangunan manusia merupakan proses meningkatkan keterampilan dan kapasitas dasar masyarakat agar mereka mampu terlibat secara optimal dalam berbagai kegiatan pembangunan (Todaro & Smith, 2006). Dalam perspektif pembangunan manusia, masyarakat dipandang sebagai sasaran utama sekaligus penerima manfaat dari seluruh proses pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur semata-mata berdasarkan peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga berdasarkan peningkatan kualitas hidup penduduk. Pendekatan tersebut kemudian diwujudkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu indikator komposit yang mengevaluasi capaian pembangunan berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat.

Dari sudut pandang perencanaan pembangunan daerah, IPM menjadi isu strategis karena menjadi indikator kinerja utama yang digunakan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengevaluasi capaian pembangunan. IPM menjadi dasar dalam penyusunan prioritas sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga perlindungan sosial.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), karena mencerminkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan Agenda 2030 yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peningkatan IPM menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (United Nations, 2015). IPM secara langsung mendukung beberapa tujuan SDGs, terutama tujuan ke-1 (tanpa kemiskinan), tujuan yang ke-3 (kesehatan dan kesejahteraan yang baik), tujuan ke-4 (pendidikan yang berkualitas), dan tujuan ke-8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang baik). Dengan memantau dan

meningkatkan IPM, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih dan mengarahkan kebijakan serta sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Ketimpangan IPM antar kabupaten atau kota di wilayah Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 1. Pada tahun 2025, Kota Makassar memiliki IPM tertinggi sebesar 85,66, diikuti oleh Kota Palopo sebesar 81,74 dan Kota Parepare sebesar 81,50. Sebaliknya, tiga kabupaten dengan IPM paling rendah yakni Kabupaten Jeneponto (70,25), Kabupaten Bone (71,63), dan Kabupaten Sinjai (72,76). Selisih IPM antara wilayah tertinggi dan terendah mencapai sekitar 15,41 poin, yang menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan manusia yang cukup lebar secara spasial.

**Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021–2025**

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Makassar	84,00	84,45	84,85	85,23	85,66
Kota Palopo	79,72	80,24	80,77	81,25	81,74
Kota Parepare	79,56	79,87	80,36	80,97	81,50
Luwu Timur	74,83	75,41	75,84	76,44	77,28
Enrekang	74,13	74,61	75,11	75,83	76,50
Pinrang	73,46	73,90	74,70	75,43	75,87
Sidenreng Rappang	73,39	73,81	74,38	74,81	75,49
Barru	72,56	72,96	73,80	74,51	75,41
Bulukumba	72,02	72,75	73,64	74,43	75,26
Luwu Utara	71,99	72,48	73,31	74,04	74,81
Maros	72,32	72,92	73,56	74,04	74,79
Wajo	72,05	72,69	73,56	73,98	74,72
Luwu	71,92	72,42	73,23	73,86	74,66
Pangkajene dan Kepulauan	71,81	72,41	73,23	73,87	74,62
Gowa	71,74	72,44	73,01	73,71	74,22
Soppeng	70,33	71,05	71,94	72,76	73,69
Toraja Utara	70,22	70,83	71,69	72,31	73,24
Bantaeng	69,71	70,41	71,28	72,20	73,12
Takalar	70,25	70,86	71,46	72,06	72,79
Kepulauan Selayar	69,68	70,27	71,13	71,98	72,78
Tana Toraja	69,78	70,16	71,01	71,94	72,77
Sinjai	70,02	70,60	71,20	71,81	72,76
Bone	68,81	69,43	70,25	70,81	71,63

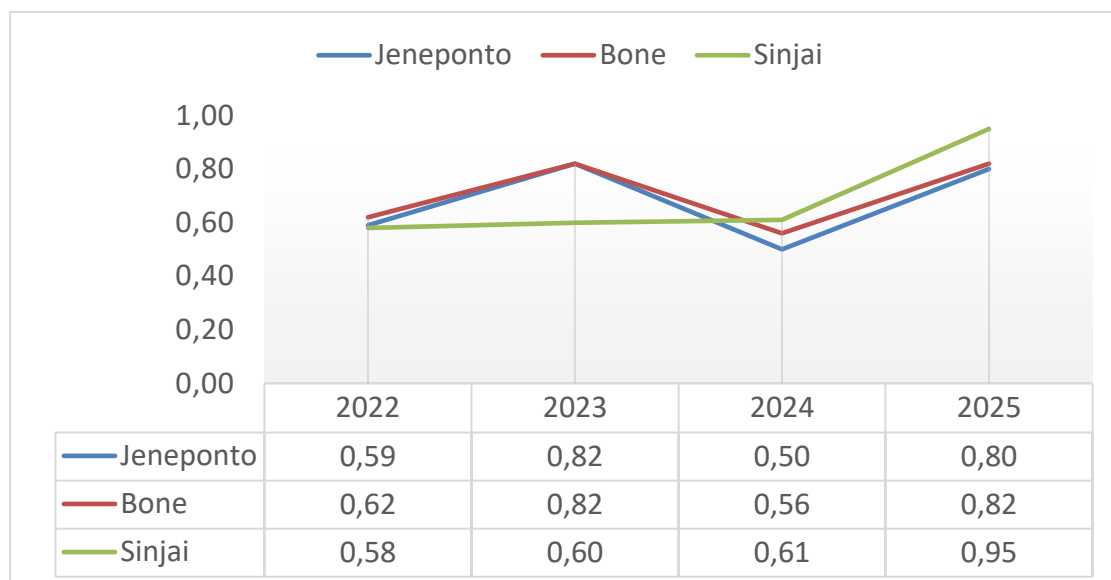
Jeneponto	67,54	68,13	68,95	69,45	70,25
Sulawesi Selatan	73,38	73,96	74,60	75,18	75,92

Sumber: sulsel.bps.go.id (diolah)

Hal menarik dari data IPM pada Tabel 1 yakni bahwa kota dengan IPM tinggi cenderung mengalami diminishing growth: peningkatan IPM Kota Makassar antara 2021–2025 hanya 1,66 poin, Kota Parepare 1,94 poin, dan Kota Palopo 2,02 poin. Fenomena ini konsisten dengan teori pembangunan di mana daerah maju cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan IPM.

Sementara itu, kabupaten dengan tiga IPM terendah pada tahun 2025 belum mampu mengejar laju peningkatan yang memadai: Jeneponto hanya meningkat 2,71 poin, Bone 2,82 poin, dan Sinjai 2,74 poin lebih rendah dibanding Kabupaten Bantaeng (3,41 poin), Soppeng (3,36 poin), dan Bulukumba (3,24 poin) yang berhasil meningkat lebih pesat pada periode yang sama.

Grafik 1 Pertumbuhan IPM pada 3 Kabupaten Terendah di Sulawesi Selatan



Sumber: sulsel.bps.go.id (diolah)

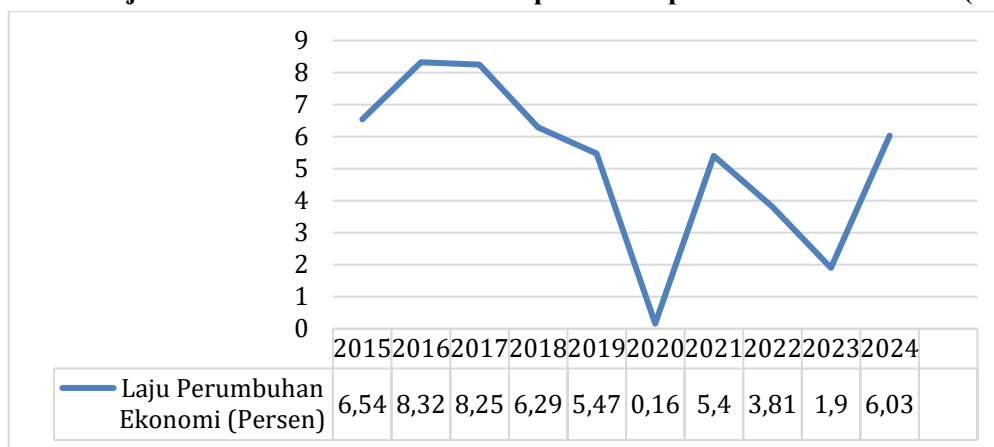
Selain data IPM yang tersaji pada Grafik 1 hasil penelitian juga melaporkan hal yang sama, bahwa Kabupaten Jeneponto secara konsisten menempati peringkat terendah (ke-24 dari 24 kabupaten maupun kota) untuk IPM di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2024, IPM Jeneponto tercatat 69,45 menjadikannya satu-satunya kabupaten yang masih berada dalam kategori "sedang" ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Tren historis menunjukkan peningkatan dari 62,67 (2017) menjadi 69,45 (2024), atau kenaikan 6,78 poin selama tujuh tahun. Tantangan pembangunan utama meliputi: stunting tertinggi se-provinsi yang langsung berdampak pada dimensi kesehatan IPM, tingkat kemiskinan tertinggi kedua di provinsi, indikator pendidikan terendah yang terlihat dari rata-rata lama sekolah

dan juga harapan lama sekolah, tantangan geografis dan infrastruktur, serta daya beli masyarakat yang rendah dengan basis ekonomi pertanian minim nilai tambah.

Berdasarkan klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai IPM dibedakan kedalam 4 kategori, yakni rendah ($IPM < 60$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), dan sangat tinggi ($IPM \geq 80$). Klasifikasi tersebut merupakan adaptasi dari konsep *Human Development Index* yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai ukuran capaian pembangunan manusia berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dengan menggunakan klasifikasi tersebut, kabupaten Jeneponto memiliki nilai IPM yang termasuk dalam kategori Lower-Medium selama periode 2014-2019. Namun, pada tahun 2020-2024, nilai IPM kabupaten tersebut berhasil naik ke kategori Upper-Medium.

Pemerintah perlu untuk mengupayakan pengembangan program peningkatan kualitas sumber daya manusia secara efektif dan terus-menerus dengan alokasi anggaran yang cukup. Dalam hal pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto, terlihat bahwa pertumbuhan ekonominya mengalami fluktuasi selama periode 2014-2024, sebagaimana ditunjukkan pada grafik 2 berikut:

Grafik 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto tahun 2015-2024 (Persen)



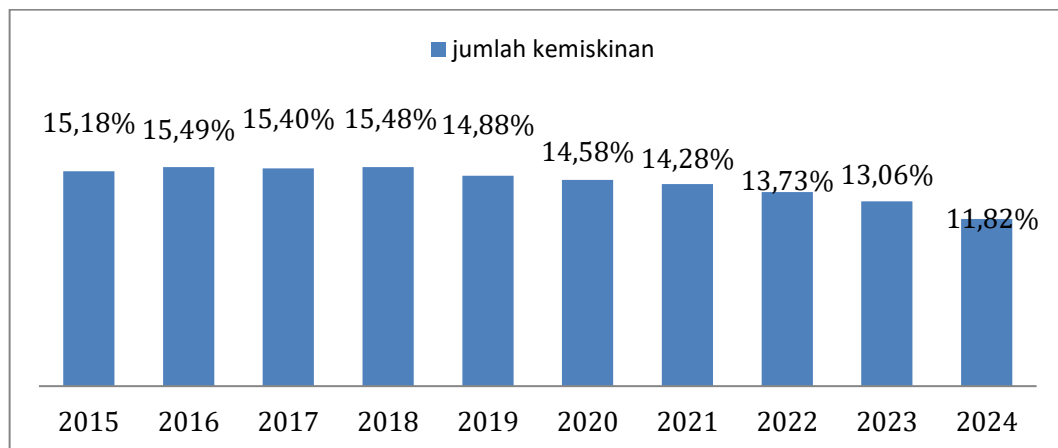
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2025

Grafik 2 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Jeneponto mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,54% pada tahun 2015, namun, mengalami penurunan cukup drastis menjadi 5,47% pada tahun 2019. Penurunan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonominya hanya sebesar 0,16%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi mulai pulih dengan mencapai 5,4% pada tahun 2021. Akan tetapi kembali menurun menjadi 1,9% pada tahun 2023, dan

tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup drastis. Berdasarkan grafik di atas terlihat berbagai tantangan yang dihadapi oleh ekonomi daerah, termasuk dampak eksternal seperti pandemi, serta menunjukkan perlunya kebijakan yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia, di mana pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, kapasitas fiskal pemerintah daerah, dan ketersediaan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup yang layak (Muhammad Iqbal & Hindun Farhany Mawaddah, 2020). Selanjutnya, kemiskinan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan manusia karena kondisi kemiskinan dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Ketidakmampuan masyarakat miskin dalam mengakses ketiga aspek tersebut dapat berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, mutu kehidupan masyarakat menurun dan produktivitas mereka akan menjadi rendah, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan dan menghambat proses pembangunan secara keseluruhan (Sidabutar et al., 2020). Kabupaten Jeneponto adalah salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang sampai saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian pemerintah serta masyarakat. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum merata dan hasil pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat.

Grafik 3. Kemiskinan Kabupaten Jeneponto tahun 2015-2024 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Jeneponto, 2025

Grafik 3 menunjukkan bahwa kemiskinan Kabupaten Jeneponto mengalami fluktuasi namun, cenderung menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2015, angka kemiskinan Kabupaten Jeneponto sebesar

15,18%. Pada tahun 2016 dan 2017, angka kemiskinan kembali meningkat sebesar 15,49% dan 15,40%, yang menunjukkan bahwa program pengurangan kemiskinan belum memberikan dampak yang signifikan. Akan tetapi, pada tahun 2018 hingga 2024 terdapat penurunan yang stabil dari 15,48% menjadi 11,82%. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang dipengaruhi oleh peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, peluang kerja, dan keberhasilan program intervensi pemerintah daerah dan pusat.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jeneponto masih menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut masih belum merata dan memerlukan perhatian lebih. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Jeneponto belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak, baik dari segi pendapatan, kesehatan, pendidikan, maupun kualitas hidup secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, seperti Makassar, Parepare, dan Sidrap yang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah, posisi Jeneponto memperlihatkan adanya ketimpangan kesejahteraan antarwilayah (Widjaja et al., 2022).

Berdasarkan uraian di atas, Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui berbagai program pembangunan. Dalam satu dekade terakhir, nilai IPM Kabupaten Jeneponto menunjukkan kecenderungan meningkat. Namun demikian, capaian tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal dan tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga memperluas akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, tingginya tingkat kemiskinan dapat menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat karena keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana dinamika pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan memengaruhi perkembangan IPM Kabupaten Jeneponto selama sepuluh tahun terakhir.

Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pembangunan manusia sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

Teori Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), pembangunan manusia merupakan proses memperluas pilihan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang sehat, berpengetahuan, dan layak.

Salah satu instrumen untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang digunakan sebagai sarana untuk menilai tingkat pembangunan manusia. (Anand & Sen, 2000) menjelaskan bahwa komponen pendapatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak dimaksudkan sebagai ukuran kesejahteraan semata, melainkan sebagai proksi terhadap berbagai kemampuan (*capabilities*) yang belum sepenuhnya tercermin melalui indikator kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan pendapatan dalam IPM didasarkan pada prinsip utilitas marjinal yang semakin menurun (*diminishing marginal utility of income*), sehingga peningkatan pendapatan pada tingkat yang lebih tinggi memberikan tambahan kontribusi yang relatif lebih kecil terhadap pembangunan manusia dibandingkan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan manusia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perluasan pilihan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. IPM memang belum mampu mencakup seluruh aspek pembangunan, tetapi ia dapat mengukur dimensi-dimensi utama yang mencerminkan kemampuan dasar penduduk. Ketiga dimensi tersebut mencakup hal-hal seperti umur dan kesehatan, pengetahuan, dan taraf hidup yang layak. Pengertiannya sangat luas karena melibatkan berbagai faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan indikator angka harapan hidup saat lahir, untuk mengukur dimensi pengetahuan, digunakan kombinasi indikator antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan untuk mengukur dimensi hidup layak, digunakan indikator kemampuan daya beli. Pengeluaran rata-rata per kapita, metode pendapatan yang menunjukkan pencapaian kemajuan dalam mencapai tingkat hidup yang layak, digunakan sebagai sarana untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Bagi Indonesia, IPM memiliki signifikansi strategis karena tidak hanya berperan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah, tetapi juga menjadi salah satu faktor penentu dalam menetapkan seberapa besar alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Investasi dalam modal fisik dan modal manusia juga memainkan peran penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalam teori pertumbuhan endogen. Teori ini menekankan pentingnya pembangunan manusia sebagai bagian

integral dari pembangunan ekonomi, dan IPM digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan. IPM membantu menilai apakah suatu negara maju, berkembang, atau terbelakang. IPM juga digunakan menilai dampak kebijakan ekonomi terhadap mutu kehidupan masyarakat (Davies & Quinlivan, 2006).

Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan kapasitas suatu negara untuk menyediakan berbagai barang dan jasa kepada masyarakat dan jangka panjang disebut pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ini juga sejalan dengan adanya kemajuan teknologi saat ini serta penyesuaian dalam struktur kelembagaan dan ideologi yang diperlukan. Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai kemajuan dalam produksi suatu negara, seperti peningkatan output industry, pembangunan infrastruktur, peningkatan jumlah sekolah, dan produksi barang modal dan jasa.

Untuk menghindari stagnasi dalam ekonomi ialah dengan mendorong permintaan di dalam negeri, seperti konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Dari teori Keynes menyatakan bahwa pasar bisa saja mengalami keseimbangan dengan banyaknya pengangguran, jika produksinya belum maksimal. Untuk mencegah hal ini terjadi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal maupun moneter, seperti dengan menaikkan belanja negara untuk meningkatkan produksi dan mengurangi pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa yang tercermin dari meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam literatur ekonomi, teori pertumbuhan berkembang dari pendekatan klasik yang menekankan pentingnya akumulasi modal, tenaga kerja, dan pembagian kerja menuju teori neoklasik yang memasukkan kemajuan teknologi sebagai faktor utama pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, teori pertumbuhan modern menempatkan inovasi, kualitas sumber daya manusia, serta kemajuan teknologi sebagai faktor endogen yang menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (Solow, 1994). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan investasi pada sektor pendidikan serta kesehatan. Namun demikian, manfaat pertumbuhan ekonomi akan optimal apabila bersifat inklusif sehingga dapat mendorong peningkatan pembangunan manusia secara berkelanjutan (Ranis et al., 2000).

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB ini adalah rata-rata tertimbang dari pertumbuhan sektoral, seperti pertanian, industri,

dan jasa. Jika salah satu sektor memiliki kontribusi yang besar namun pertumbuhannya lambat, maka dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Kenaikan pendapatan daerah juga memperkuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Ini karena pemerintah memiliki lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan publik (Todaro & Smith, 2006). Namun demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak selalu bersifat linier. (Ranis et al., 2000) menjelaskan bahwa terdapat hubungan timbal balik (*two-way relationship*) antara pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan pembangunan manusia (*human development*). Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat dan penerimaan pemerintah yang memungkinkan investasi lebih besar pada sektor pendidikan, kesehatan, serta program-program sosial. Di sisi lain, pembangunan manusia yang baik melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia saling memperkuat satu sama lain apabila didukung oleh kebijakan publik yang tepat.

Dalam studi (Syam, 2014) menunjukkan bahwa pergeseran kebiasaan konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan output per kapita dan daya beli masyarakat. Dalam hal ini, memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Sulawesi Selatan. Artinya, dengan pertumbuhan ekonomi, masyarakat memiliki kemampuan untuk membelanjakan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan yang terus muncul dari masa ke masa. Sebab kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya pendapatan, pendidikan, akses terhadap layanan dasar, dan kondisi sosial dan lingkungan. Kemiskinan terjadi ketika individu atau rumah tangga mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok minimum atau hidup pada tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan masyarakat sekitarnya. Ketimpangan distribusi pendapatan, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah disertai keterbatasan dalam mengakses modal turut memperkuat munculnya lingkaran kemiskinan, sehingga membuat kondisi kemiskinan sulit diatasi tanpa intervensi yang tepat dan berkesinambungan.

Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan di mana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi standar hidup minimum yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar ini menunjukkan bahwa seseorang

atau rumah tangga berada dalam kondisi keterbatasan ekonomi yang menghambat kualitas hidup dan peluang mereka untuk berkembang.

Teori lingkaran kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi dan terus berulang karena adanya keterbelakangan sumber daya manusia, pasar yang tidak sempurna, dan kurangnya modal. Kondisi ini menyebabkan produktivitas rendah, sehingga pendapatan masyarakat ikut menurun (Rainer Kattel et al., 2009). Rendahnya pendapatan juga berpengaruh pada kecilnya konsumsi, tabungan, dan investasi, yang pada akhirnya dapat menghambat akumulasi modal dan penciptaan lapangan kerja (Salsabilla et al., 2021).

Menurut (Sen, 2001), kemiskinan tidak semata-mata merefleksikan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga menunjukkan adanya keterbatasan kapabilitas (*capability deprivation*) yang menyebabkan seseorang tidak memiliki kebebasan untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Dalam perspektif *Capability Approach*, kesejahteraan manusia tidak semata-mata bergantung pada besarnya pendapatan, melainkan juga oleh kapasitas individu untuk memperoleh pendidikan, menikmati kesehatan yang baik, memperoleh pekerjaan yang layak, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya. Oleh karena itu, pembangunan seharusnya dipandang sebagai proses memperluas kebebasan (*expanding human freedoms*) hal ini memungkinkan setiap individu untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensinya secara optimal.

Hubungan Kemiskinan dengan IPM

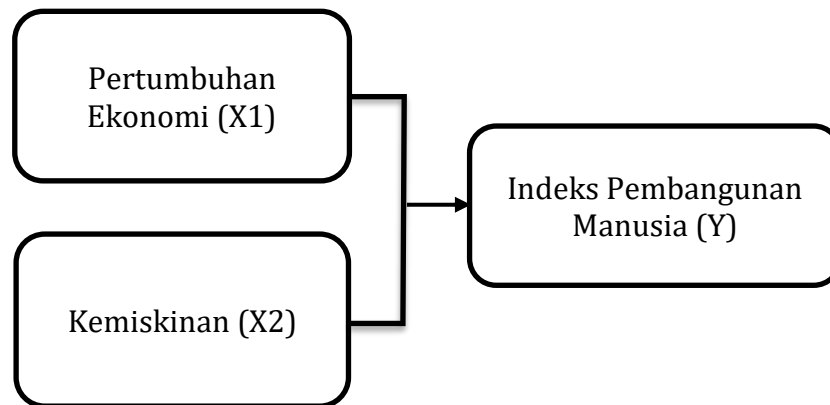
Kemiskinan dapat secara langsung dapat menurunkan nilai IPM karena membuat masyarakat sulit dalam memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas serta layanan kesehatan yang memadai serta kebutuhan hidup yang berkualitas. Kondisi ini menyebabkan harapan hidup lebih rendah, tingkat pendidikan lebih pendek, dan pendapatan per kapita yang kecil (Komariyah et al., 2023).

Kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik sangat berperan penting dalam menurunkan kemiskinan. Ketika pemerintah meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, masyarakat menjadi lebih sehat, terampil, dan produktif sehingga pendapatan mereka meningkat. Kondisi tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya menurunkan tingkat kemiskinan. Rendahnya IPM membuat masyarakat miskin sulit untuk memanfaatkan peluang ekonomi karena keterbatasan dalam kemampuan untuk bekerja (Fatimah, 2018).

Kerangka Konseptual

Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian ini yang berpotensi memengaruhi IPM di Kabupaten Jeneponto adalah Pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Faktor-faktor ini dianggap memiliki dampak signifikan terhadap IPM di Kabupaten Jeneponto. Disusun kerangka pikir penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

METODE

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, menurut Sugiyono (2019), penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data berbentuk angka dan dianalisis secara statistik. Penelitian ini juga menggunakan jenis data sekunder, berupa data Time series kurun waktu 10 tahun yaitu tahun 2015 hingga 2024.

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan dokumentasi dari sumber sekunder resmi BPS kabupaten Jeneponto dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta lembaga terkait lainnya yang dianggap mewakili lingkup penelitian.

Model Analisis Data

Model analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini ialah Regresi Linear Berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Metode ini dipilih karena dapat menjelaskan seberapa besar Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan demikian, Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

$$Y = f(X1, X2) \dots\dots\dots(1)$$

Model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \ln X_1 - \beta_2 \ln X_2 + \mu \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

Y = Indeks Pembangunan Manusia

X1 = Pertumbuhan Ekonomi (Persen), diproyeksi dari nilai PDRB menurut lapangan usaha

X2 = Tingkat Kemiskinan (Persen)

α = Intercept/Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

μ = Error Term

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif menggambarkan kondisi umum karakteristik data yang digunakan dalam penelitian yang terdiri atas variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan tingkat masyarakat miskin selama periode 2015–2024.

Gambar 2 Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	65,4710	3,07769	10
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	5,2170	2,60434	10
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	14,3900	1,20830	10

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Rata-rata IPM Kabupaten Jeneponto selama periode pengamatan adalah 65,471 dengan standar deviasi 3,078. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia berada pada kategori sedang dan mengalami variasi yang relatif kecil selama sepuluh tahun pengamatan, yang mengindikasikan adanya peningkatan IPM secara bertahap dan stabil.

Laju rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,217% dengan simpangan baku 2,604. Nilai simpangan baku yang relatif besar dibandingkan rata-ratanya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, terutama akibat kontraksi ekonomi pada periode pandemi COVID-19 proses pemulihan ekonomi setelahnya.

Persentase penduduk miskin memiliki rata-rata 14,390% dengan standar deviasi 1,208, yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan cenderung menurun secara bertahap dengan variasi yang relatif kecil antarperiode.

Secara umum, statistik deskriptif mengindikasikan bahwa selama periode penelitian terjadi peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diiringi oleh penurunan tingkat kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi menunjukkan dinamika yang lebih fluktuatif.

Analisis Koefisien Determinasi (Model Summary)

Gambar 3 Model Summary

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			
						F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.948 ^a	.898	.869	1,11414	.898	30,838	2	7	<,001

a. Predictors: (Constant), PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Nilai R dengan hasil 0,948 menunjukkan jika hubungan simultan antara laju pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin dengan IPM tergolong sangat kuat. Nilai R Square dengan hasil 0,898 mengindikasikan jika 89,8% variasi IPM dapat diinterpretasikan berdasarkan variasi laju pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin. Sementara itu, 10,2% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian, seperti kualitas layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, investasi pemerintah, infrastruktur, tingkat pengangguran, dan faktor sosial-ekonomi lainnya.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,869 memperlihatkan jika setelah memperhitungkan total nilai variabel bebas serta ukuran sampel, model masih memiliki kemampuan penjelasan yang tinggi. Namun, perlu dicatat bahwa model dibangun menggunakan 10 observasi tahunan. Oleh karena itu, meskipun nilai koefisien determinasi tinggi, generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati karena ukuran sampel yang terbatas dapat meningkatkan sensitivitas model terhadap perubahan data.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Gambar 4 Anova

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	76,560	2	38,280	30,838	<,001 ^b
	Residual	8,689	7	1,241		
	Total	85,249	9			

a. Dependent Variable: INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

b. Predictors: (Constant), PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F hitung yaitu 30,838 dengan tingkat signifikansi <0,00. Nilai signifikansi yang menunjukkan hasil lebih kecil dari 0,05, maka model regresi secara keseluruhan signifikan. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk dengan kategori miskin secara simultan berpengaruh kepada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jenepono.

Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi antara kondisi ekonomi dan kondisi sosial, khususnya tingkat kemiskinan.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Gambar 5 Coefficients

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	94,619	4,565		20,728	<,001	83,825	105,413
	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	-,451	,155	-,381	-2,907	,023	-,817	-,084
	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	-1,862	,334	-,731	-5,575	<,001	-2,652	-1,072

a. Dependent Variable: INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM

Koefisien regresi sebesar $-0,451$ menunjukkan bahwa, dengan asumsi tingkat kemiskinan tetap, setiap kenaikan laju pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen diikuti oleh penurunan IPM sebesar $0,451$ poin. Secara statistik pengaruh tersebut signifikan karena nilai $p = 0,023 < 0,05$, hal ini sejalan dengan yang disebutkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak selalu bersifat linier. (Ranis et al., 2000) menjelaskan bahwa terdapat hubungan timbal balik (*two-way relationship*) antara pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan pembangunan manusia (*human development*).

Meskipun demikian, arah koefisien yang negatif tidak sejalan ditinjau dari teori pembangunan ekonomi, dimana umumnya menjelaskan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hal ini disebabkan oleh jumlah observasi yang sangat terbatas (10 tahun); adanya guncangan pandemi COVID-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun drastis sementara IPM tetap meningkat; kemungkinan hasil pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata oleh masyarakat (pertumbuhan belum inklusif); dan atau adanya variabel penting lain yang belum dimasukkan ke dalam model.

Pengaruh Persentase Penduduk Miskin terhadap IPM

Besaran koefisien regresi yang mencapai $-1,862$ memperlihatkan jika setiap kenaikan satu persen pada tingkat kemiskinan diperkirakan menyebabkan penurunan IPM sebesar $1,862$ poin, dengan menganggap variabel lain tidak berubah. Nilai signifikansi $<0,001$ memperlihatkan jika pengaruh tersebut sangat signifikan.

Hasil tersebut konsisten sejalan dengan teori pembangunan manusia yang memandang kemiskinan sebagai pengurang akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, gizi, serta kesempatan ekonomi sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan manusia.

Dibandingkan variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan memberikan pengaruh jauh lebih dominan kepada IPM, dicerminkan dari nilai Standardized Beta, yaitu $-0,731$ untuk kemiskinan dibandingkan $-0,381$ untuk pertumbuhan ekonomi. Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$\text{IPM} = 94,619 - 0,451 (\text{LPE}) - 1,862 (\text{Kemiskinan})$$

$$\text{IPM} = Y;$$

$$\text{LPE} = X1;$$

$$\text{Kemiskinan} = X2.$$

Interpretasi persamaan tersebut adalah sebagai berikut Konstanta $94,619$ merupakan nilai IPM yang diperkirakan ketika laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan bernilai nol. Secara

matematis nilai ini diperlukan untuk membentuk model, namun tidak memiliki makna praktis karena kondisi tersebut tidak terjadi dalam kenyataan.

Koefisien $-0,451$ menunjukkan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan IPM dalam model ini. Koefisien $-1,862$ menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan memiliki efek negatif yang lebih tinggi terhadap IPM dibandingkan variasi pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Analisis menunjukkan bahwa selama periode 2015–2024, nilai IPM Kabupaten Jeneponto mengalami kenaikan yang konsisten. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun. Kedua tren ini mendukung teori pembangunan manusia yang mengatakan bahwa penurunan kemiskinan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan, serta standar hidup yang semakin baik.

Sebaliknya, laju pertumbuhan ekonomi berfluktuasi cukup tajam, terutama akibat pandemi COVID-19. Karena IPM cenderung meningkat secara bertahap sementara pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan pemulihan yang tidak sejalan, model menghasilkan koefisien pertumbuhan ekonomi yang negatif. Secara substantif, hasil tersebut lebih mencerminkan karakteristik data deret waktu yang pendek daripada hubungan ekonomi yang sesungguhnya.

Data yang dihasilkan melalui analisis regresi linear berganda memperlihatkan jika model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variasi IPM Kabupaten Jeneponto ($R^2 = 0,898$). Secara simultan, laju pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Secara parsial, tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM serta merupakan faktor yang paling dominan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga signifikan tetapi memiliki koefisien negatif. Temuan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat sepanjang periode penelitian tidak sepenuhnya diikuti oleh meningkatnya kualitas pembangunan manusia secara langsung, sehingga mengindikasikan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, yaitu pertumbuhan yang mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan kemiskinan. Di sisi lain, penurunan kemiskinan terbukti menjadi faktor yang lebih konsisten dalam mendorong peningkatan IPM Kabupaten Jeneponto.

REFERENSI

- Anand, S., & Sen, A. (2000). The Income Component of the Human Development Index. *Journal of Human Development*, 1(1), 83–106. <https://doi.org/10.1080/14649880050008782>
- Davies, A., & Quinlivan, G. (2006). A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development. *Journal of Socio-Economics*, 35, 868–876. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2005.11.048>
- Komariyah, S., Priyono, T. H., & Nathania, C. (2023). Impact of Poverty, Economic Growth, and Information and Communication Technology on Human Development. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:265175474>
- Muhammad Iqbal, & Hindun Farhany Mawaddah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro Tahun 2007-2017 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/slm.v1i1.7021>
- Rainer Kattel, Jan Kregel, & Erik Reinert. (2009). Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries (1953). In R. Kattel, J. Kregel, & E. Reinert (Eds.), *Ragnar Nurkse: Trade and Development* (pp. 99–212). Anthem Press. <https://doi.org/DOI:10.7135/UPO9781843318187.010>
- Ranis, G., Stewart, F., & Ramirez, A. (2000). Economic Growth and Human Development. *World Development*, 28(2), 197–219. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00131-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00131-X)
- Salsabilla, A., Juliannisa, I. A., & Triwahyuningtyas, N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 96–105. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/1319>
- Sen, A. (2001). *Development as Freedom*. OUP Oxford. <https://books.google.co.id/books?id=QPqNDwAAQBAJ>
- Sidabutar, S., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2), 86–101. <https://doi.org/10.36985/bkn96b53>
- Solow, R. M. (1994). Perspectives on Growth Theory. *Journal of Economic Perspectives*, 8(1), 45–54. <https://doi.org/10.1257/jep.8.1.45>
- Sugiyono, P. D. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67(2019), 18.
- Syam, S. F. (2014). *PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN IPM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI SELATAN*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:106809363>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic Development*. Pearson Addison Wesley. https://books.google.co.id/books?id=m8kMk_KbSX4C
- United Nations. (2015). *70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Preamble*.
- Widjaja, I., Deddy T. Tikson, & Rahmadanih. (2022). Association of Development Disparity, Economic Growth on Poverty in South Sulawesi Province. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 3(3), 246–255. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i3.213>